

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penetapan pidana terhadap pelaku mucikari melalui media online merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan teknis. Mucikari melalui media online melakukan berbagai bentuk tindak pidana, termasuk menyiarkan informasi layanan seksual, menjalin komunikasi dengan pekerja seks dan pengguna, serta memudahkan tindakan cabul. Mereka memanfaatkan media sosial dan aplikasi untuk mempromosikan dan mengatur transaksi prostitusi. Dalam operasinya, mucikari menggunakan berbagai pola, seperti manipulasi, pengontrolan, pemancingan, dan pengintimidasi, sering kali dengan identitas palsu dan teknologi untuk menyembunyikan jejak mereka, sehingga menyulitkan proses penyelidikan dan penegakan hukum.
2. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP dan undang-undang terkait yang dapat diterapkan pada kasus mucikari melalui media online, seperti Pasal 296, 297, dan 299 KUHP, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Namun, masih terdapat kekurangan dalam peraturan yang secara spesifik mengatur tindak pidana ini di ranah online. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku mucikari melalui media online melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengumpulan informasi awal hingga penangkapan dan penuntutan. Namun, berbagai hambatan dihadapi, baik dari

segi hukum, teknis, maupun sosial, seperti keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, dan tantangan dalam mengumpulkan bukti.

Penelitian di Polresta Padang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku mucikari melalui media online telah dilakukan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal-pasal yang relevan, tetapi prosesnya tidak selalu berjalan lancar karena hambatan yang ada. Secara keseluruhan, penetapan pidana terhadap pelaku mucikari melalui media online memerlukan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Diperlukan juga peningkatan kesadaran hukum dan dukungan bagi korban untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi praktik mucikari di dunia maya.

4.2. Saran

1. Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku mucikari melalui media online, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, penting untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan workshop yang fokus pada teknologi informasi dan cara-cara baru yang digunakan oleh pelaku mucikari, termasuk pemahaman tentang media sosial dan teknik penyelidikan digital. Selain itu, regulasi yang ada perlu dikaji dan diperbarui agar lebih spesifik mengatur tindak pidana mucikari di ranah online, dengan penegasan sanksi bagi pelaku dan penyedia platform yang tidak bertanggung jawab. Membangun kolaborasi dengan penyedia layanan

media sosial dan aplikasi juga sangat penting untuk memfasilitasi pelaporan dan penghapusan konten yang berkaitan dengan prostitusi.

2. Di sisi lain, peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi dapat membantu masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan. Dukungan bagi korban prostitusi dan perdagangan orang juga harus menjadi prioritas, dengan menyediakan layanan konseling, rehabilitasi, dan perlindungan hukum untuk membantu mereka keluar dari situasi yang merugikan. Selain itu, memanfaatkan teknologi canggih, seperti analisis data dan kecerdasan buatan, dapat membantu dalam mendeteksi pola-pola mencurigakan dalam transaksi online yang berkaitan dengan prostitusi. Kerjasama internasional juga perlu dijalin, mengingat praktik mucikari sering kali melibatkan jaringan internasional, sehingga pertukaran informasi dan strategi penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif. Terakhir, penyusunan protokol yang jelas untuk penanganan kasus mucikari, mulai dari pengumpulan bukti hingga penuntutan, akan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku mucikari melalui media online dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi praktik yang merugikan di dunia maya.